

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Ahmad, A, M Fachrurrazy, M Amalia, E Fauzi, S. L Gaol, D. N Siliwadi, And T Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Arifuddin, Q., R. Riswan, M. A. HR, B. Bulkis, A. Latif, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Aromatica, Desna. *Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Administrasi Publik: Sebuah Kajian tentang Kelembagaan*. CV. Amerta Media, 2021.
- Hedwig Adianto Mau dan Tinton Ditisrama. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*. Amerta Media, 2024.
- Ubaid Ridlo. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2023.
- Hildawati, Dila Erlianti, dkk. *Sistem Administrasi Negara (Teori dan Praktik)*. PT Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Johan, Teuku Siaful Bahri. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi*. Deepublish, 2018.
- Kusworo, Hendrie Adji. *Kewiralembagaan: Meninjau Ulang Kelembagaan untuk Pembangunan Sosial*. 2022.
- Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.
- Paratama, Faradillah. *Reformulasi Pengaturan Pengadaan ASN*. Diva Pustaka, 2026.
- Radjab, Syamsuddin. *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Nagamedia, 2023.
- Ramadhani, Marina, dkk. *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Scott, W. Richard. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*.

SAGE Publications, 2023.

Abdul Rasyid Thalib. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Weron Murary, Aner D. Maisini, dan Raymond R. Morintosh. Hukum Administrasi Negara: Teori dan Implementasi Membangun Pemerintah yang Efektif. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

JURNAL

Alya, D., Suhendra, A. S. R., Pratama, F. D., Iskandar, I., & Madinar, M. (2026). Kedudukan lembaga pengawas dan penguatan sistem merit pasca Putusan MK 121/PUU-XXII/2024. *Verdict: Journal of Law Science*, 5(1), 55–65.

Anggoro, F. N. (2022). Penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai penjaga sistem merit dalam manajemen ASN di Indonesia. *Journal of Law and Human Rights Wara Sains*, 1(2), 206–212.

Antoro, B. H. W. (2024). Netralitas pegawai ASN dalam pemilihan umum (Catatan kritis Pemilu Presiden 2024). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1–14.

Aswin Maysura, N. (2025). Peran sistem merit dalam reformasi birokrasi di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 85–105.

Barus, S. I. (2022). Reformulasi pengaturan dan penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pengawas eksternal dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 283–297.

Dea Zailani Lestari, Y., Tiurida, P., Nabila, P. S., & Pangestoeti, W. (2024). Seminar Pemuda Berdaulat Undiksha: Menelaah peran pemuda dalam menjaga kelangsungan demokrasi. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3), 122–128.

Fahrozi, M. H. (2024). Kajian terhadap tujuan filosofis dan realitas lembaga negara independen di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10(2), 411–433.

Fizabillah, A. F., Damayanti, S., & Yasin, M. (2024). Strategi pendekatan historis dan pragmatis. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 128–135.

Hakim, M. A. L., Suryadi, K., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2022). Konteks perubahan dan keberlanjutan kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur sebagai analisis perkembangan kelembagaan dalam perspektif institusionalisme historis. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 420–436.

- Hendra, & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of good corporate governance (GCG) principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *IAPA Proceedings Conference*, 187.
- Juliartha, E., Suandi, S., Rakhmat, R., Yusrainiwati, Y., & Yuliana, Y. (2024). Sosialisasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada ASN Jabatan Fungsional Analisis SDM Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)*, 2(2), 119–128.
- Kurnianingsih, F., Adhayanto, O., Mahadiansar, M., & Setiawan, R. (2022). Rational choice institutionalism of reclamation permits at the Department of Marine and Fisheries Kepulauan Riau Province. *Ecsofim*, 9(1), 292–304.
- Lasambo, N., Otoluwa, S. N. U., & Moonti, R. M. (2025). Efektivitas penerapan sistem merit terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam manajemen PNS. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 26–37.
- Mahanum. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Muwahid, M. F. (2024). Pengawasan asas netralitas Aparatur Sipil Negara pada masa Pemilihan Umum 2024 pasca dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4, 202–208.
- Putri, K. A., Alqarina, S. A., Sibarani, N. Q., & Wulandari, S. R. (2025). Sumber-sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 778–788.
- Roziqin, R., Susiswo, S., & Rusdianto, W. J. (2023). Pendekatan konseptual antara prosedural dan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. *Journal De Facto*, 10(1), 45–60.
- Saputra, I. E., & Rahman, A. (2024). Reformasi sistem perundang-undangan Indonesia: Strategi pembentukan lembaga independen untuk menangani hiper-regulasi. *JAPHTN-HAN*, 3(1), 69–88.
- Sari, R. K. (2021). Penelitian kepustakaan dalam penelitian pengembangan pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69.
- Siagian, N. M. (2025). Langkah strategis pengawasan sistem merit Aparatur Sipil Negara pasca UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 2(2), 153–176.
- Sorik, S., Natalia, S. W., Yustiyah, E., & Dwiarmoko, A. (2022). Problematika pengisian jabatan menteri yang membidangi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 2(1), 5.

- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 101–113.
- Sumodiningrat, A., Helmi, A., & Rifat, T. B. (2022). Desain lembaga khusus bidang legislasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan partisipatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 380.
- Umam, K., Ashari, A., & Amalia, R. A. (2023). Rekonstruksi prinsip checks and balances antar lembaga negara berdasarkan Pancasila. *JATISWARA*, 38(2), 185–197.
- Yati Rasma Putri, A. S. B., El-Fadhla, I. Z., Ritonga, A. E. P., Hidayatullah, R., & Harmonedi. (2025). Langkah-langkah penyusunan proposal penelitian pendidikan. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 882–896.
- Yuliana, A. (2024). Peran dan potensi sinergi Mahkamah Konstitusi dan pemerintah dalam mewujudkan praktik *good governance* di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(1), 14–30.
- Zaidir, Fitirawati, N. H. T. D., & Arfai. (2022). Analisis Perpu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022. *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 361–377.

SKRIPSI

- Aqorin Nadifatuz Zulfa. *Kedudukan Hukum Komisi Aparatur Sipil Negara Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Perspektif Siyash Dusturiyah*. Skripsi, 2025.
- Syahril, Muhammad Iqbal. *Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia*. Tesis, 2022.
- Khaerunnisa, Devina. *Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta dalam Rangka Mewujudkan SDM Aparatur Unggul di Lembaga Administrasi Negara*. Tesis/Proyek Akhir, Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023.

PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024.